

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD TONNY HARJONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **801475**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.330.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 321 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/340 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/350 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/260 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 730.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 798.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, LANDROVER MB PENUMPANG Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. MOBIL, MERCEDES BENZ 300SEL/SEDAN Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOBIL, BMW 520I/SEDAN Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. MOBIL, BMW 523I/SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000



6. MOTOR, YAMAHA SE88/SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
7. MOBIL, BMW 325I/SEDAN Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	918.715.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.046.715.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.046.715.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.